

### **BAB III**

## **SIKAP HIZBUT TAHRIR TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

Pada bab ketiga, penulis akan memaparkan awal masuk Hizbut Tahrir ke Indonesia dan sikap atau aksipemolakan Hizbut Tahrir terhadap sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Awal masuknya Hizbut Tahrir di Indonesia adalah pada era Presiden Soeharto, dimana rezim ini segala pergerakan yang berlabel fundamentalisme yang sangat dimobilisasi oleh pemerintahan. Namun ketika Reformasi tahun 1998 meledak, setelah itu banyak bermunculan organisasi-organisasi dari berbagai aliran, karena Demokrasi di Indonesia telah bertumbuh subur, disinilah banyak pergerakan bermunculan dalam pencarian kader-kader baru dan penanaman ideologi yang pergerakan itu milik Hizbut Tahrir di era reformasi menunjukkan taringnya untuk menyebar luaskan dan melebarkan dakwahnya.

#### **A. Perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia**

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an diperkenalkan kepada Indonesia oleh Abdurrahman al-Baghdadi,<sup>32</sup> pimpinan Hizbut Tahrir di Australia, yang pindah ke Bogor atas undangan KH Abdullah bin Nuh. Abdullah Bin Nuh adalah seorang ulama terkemuka Islam dengan banyak

---

<sup>32</sup>Tentang Kami, <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>, diakses 16 Maret 2014.

pengikut, dan beliau merupakan pimpinan Pesantren Al-Gazhali. Gerakan Hizbut Tahrir ini disebarkan dan berkembang secara pesat melalui jaringan dakwah kampus.

Munculnya Hizbut Tahrir di Indonesia memang menarik, Greg Fealy mencatat bahwa Hizbut Tahrir Indonesia mungkin satu-satunya organisasi Islam, yang dikendalikan oleh suatu kepemimpinan asing, yang didasarkan ideologi yang kuat dari sumber Timur Tengah, dan agendanya secara fundamental transnasional.

Pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir yang diperkenalkan oleh al-Baghdadi ternyata mampu memincut perhatian para aktivis masjid kampus. Kemudian dibuatlah pengajian-pengajian kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir. Gerakan dakwah Hizbut Tahrir pada era 1990-an semakin merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan dan perumahan.<sup>33</sup>

Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode, periode pertama adalah selama rezim Orde Baru Soeharto ketika Indonesia pada dasarnya sebuah negara otoriter yang kuat. Periode kedua adalah selama periode pasca Orde Baru (Reformasi) dimana Indonesia mulai transisi ke demokrasi. Selama masa Orde Baru, Hizbut Tahrir Indonesia mempertahankan profil rendah dan menggunakan jaringan informal untuk menyebarkan pengaruhnya. Hal ini tidak sepenuhnya mengejutkan, karena

---

<sup>33</sup> Ibid.

gerakan sosial sering memanfaatkan jaringan informal untuk merekrut dan mengajukan kasus mereka di negara-negara dimana sistem politik kurang terbuka. Dengan demikian, gerakan ini tidak mendapat ancaman terhadap rezim. Pada tahap awal tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan berbagai badan mahasiswa muslim untuk memperluas jaringan dan dukungan.

Pasca reformasi yang ditandai dengan kebebasan yang semakin terbuka merupakan prakondisi yang kondusif bagi Hizbut Tahrir Indonesia untuk tampil ke permukaan. Pemikiran dan ideologi Hizbut Tahrir Indonesia mulai menyebarkan di luar Bogor melalui jaringan kampus yang dikenal sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di beberapa universitas seperti UNPAD Bandung, UI Jakarta, UGM Yogyakarta, IKIP Malang, UNAIR Surabaya, IKIP Surabaya, UNHAS Makassar, semuanya merupakan kampus-kampus sekuler dan dengan cepat mampu mencapai setiap provinsi di Indonesia.

Di Indonesia Hizbut Tahrir mendeklarasikan dirinya dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2000.<sup>34</sup> Menurut HTI Indonesia adalah sasaran penting untuk tegaknya Daulah Khilafah. Dibuktikan dengan Konferensi Khilafah Internasional pertama pada 28 Mei 2000 dan konferensi kedua pada 12 Agustus 2007. Bahkan HTI pernah mengajak Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk menegakkan Khilafah di Indonesia.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Rofiq Al-amin Ainur, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbu Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hal 4.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 5.

Euforia reformasi semakin dimanfaatkan Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan konferensi internasional khilafah Islam di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir internasional maupun nasional serta tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka seperti bisa dilihat dari munculnya organisasi ini dalam konteks Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia. Sejak kemunculannya secara resmi ke publik, Hizbut Tahrir telah menjadi kekuatan baru Islam.<sup>36</sup>

Pada tahun 2011, Ismail Yusanto menjelaskan lima alasan peluang besar bagi tegaknya khilafah di Indonesia. Diantaranya dukungan umat yang besar, Hizbut Tahrir semakin besar dan dakwah berjalan aman, kepercayaan publik pemerintah Indonesia semakin merosot, besarnya potensi SDA dan SDM di Indonesia, dan pengalaman historis Indonesia dalam menerapkan syari'at Islam.<sup>37</sup>

#### **B. Adopsi Sistem Pemerintahan Indonesia dari Sistem Demokrasi**

Negara adalah suatu organisasi kerjasama dimana dalam negara ada pengurus yang disebut pemerintah dan ada yang diurus oleh warga negara. Adapula yang berpendapat bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, yang membedakannya dengan organisasi-organisasi lainnya. Kekuasaan adalah

---

<sup>36</sup> Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), hal 295.

<sup>37</sup>Op.cit, hal 6.

kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain atau kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain.

Bentuk Negara dapat dibedakan berdasarkan pada jumlah orang yang memegang pimpinan negara. Ada tiga bentuk negara berdasarkan jumlah orang yang memimpin negara, yaitu:

a. Negara Monarchie

Monarchie berasal dari bahasa Yunani mono yang artinya satu, tunggal, dan archein yang artinya memerintah. Monarchie adalah pemerintahan dimana kekuasaan negara dipegang oleh satu orang, yang menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang.

b. Negara Oligarchie

Oligarchie berasal dari kata oligol yang berarti beberapa, dan archein yang artinya memerintah. Jadi oligarchie adalah pemerintahan dimana kekuasaan negara dipegang oleh sejumlah orang yang biasanya berasal dari golongan feodal.

c. Negara Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dimana kekuasaan Negara terletak ditangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang.

## **1. Sejarah Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia**

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.

Secara etimologis “demokrasi” berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat, dan “kratein” yang berarti pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Kemudian oleh Abraham Lincoln demokrasi diberi pengertian yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam demokrasi dipahami bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan dari rakyat. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus benar-benar memperhatikan keinginan rakyat dan berusaha melayani kepentingan rakyat. Jadi dalam sistem demokrasi rakyat menempati posisi yang sangat penting.

Walaupun sulit dibayangkan bahwa rakyat yang sedemikian banyaknya ikut menjalankan kekuasaan, akan tetapi dengan paham demokrasi rakyat merasa berhak untuk ikut mempengaruhi jalannya pemerintahan, sedangkan dipihak lain pemerintah tidak dapat menjalankan pemerintahan menurut kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan keinginan rakyat. Dalam kerangka pemahaman dan kesadaran tentang kekuasaan rakyat, maka terdapat

pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah sehingga pemerintah tidak dapat berlaku sewenang-wenang. Pembatasan terhadap kekuasaan tersebut tercermin dalam undang-undang dasar atau konstitusi. Oleh karena itu di Negara yang berdemokrasi memiliki undang-undang dasar atau konstitusi. Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik, hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legeslatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar

ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.<sup>38</sup>

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerinah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legeslatif. Keputusan legeslatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legeslatif selain sesuai hukum dan peraturan. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi, sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar

---

<sup>38</sup> *Makalah Demokrasi*, [https://www.academia.edu/3831902/MAKALAH\\_DEMOKRASI](https://www.academia.edu/3831902/MAKALAH_DEMOKRASI), di akses 16 Maret 2014

ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolute pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislative menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel, tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Demokrasi menjadi asas pemerintahan yang sangat populer sejak selesainya Perang Dunia II, dimana Negara-negara yang muncul setelah selesainya Perang Dunia II menyatakan bahwa pemerintahan negaranya adalah pemerintahan yang demokratis. Walaupun dalam kenyataan tampilan sistem pemerintahan mereka berbeda antara satu dengan yang lain.

Pengertian demokrasi harus dibedakan antara demokrasi sebagai idea tau konsep dan demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan yang actual. Dalam pengungkapan Afan Gaffar, ada dua macam pemahaman tentang demokrasi, yaitu pemahaman secara normative dan pemahaman secara empiric.<sup>39</sup> Apa yang normative belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari dalam suatu Negara. Oleh karena itu sangat perlu untuk melihat

---

<sup>39</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta 2006), hal 3.

bagaimana makna demokrasi secara empiric yaitu demokrasi dalam perwujudan kehidupan politik praktis.

Demokrasi sebagai ide atau konsep adalah demokrasi sebagaimana ada dalam kerangka berpikir atau kerangka konseptual kita. Sedangkan demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan actual adalah demokrasi sebagaimana tampak dalam praktek pemerintahan, atau demokrasi sebagaimana diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara konseptual, hampir semua orang sepakat mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk melayani kepentingan rakyat. Di samping itu secara konseptual juga dapat disusun suatu daftar mengenai arti, makna, dan sikap serta perilaku yang tergolong demokratis. Kedaulatan tertinggi ditangan rakyat, adanya kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat, adanya kebebasan memilih dalam pemilihan umum adalah beberapa contoh ide yang terdapat dalam demokrasi.

Sebagai praktis, demokrasi sudah menjelma menjadi sistem pemerintahan yang actual. Ketika telah menjadi sistem pemerintahan, pelaksanaan demokrasi terikat oleh seperangkat aturan main tertentu dan dipengaruhi oleh ideologi yang dianut serta sistem nilai budaya masyarakat dimana demokrasi diterapkan. Apabila dalam sistem demokrasi ini ada orang atau kelompok yang dalam menjalankan aktivitas berdemokrasinya tidak mentaati aturan main yang berlaku, walaupun secara idea atau konsep dapat dianggap demokratis, maka aktivitas ini akan merusak demokrasi yang ada.

Dengan kata lain, aktivitas ini menjadi aktivitas yang tidak demokrasi. Dalam konteks perbedaan ideologi dan sistem nilai budaya, walaupun negara-negara yang ada sama-sama menyatakan berdemokrasi, akan tetapi dalam kenyataan tampilan pemerintahannya sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Karena itulah ada beberapa predikat atau sebutan yang biasa disertakan pada demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin. Di Indonesia sendiri sejak memasuki masa Orde Baru diintrodusir sebuah sistem demokrasi yang disebut Demokrasi Pancasila.

Ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi:

a. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak:

Konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi.

Perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang.

Pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen.

Kepartaian, yaitu bahwa partai politik merupakan media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi.

b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, misalnya pembagian atau pemisahan kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif.

c. Adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan.

## **2. Pelaksanaan Sistem Demokrasi di Indonesia**

Dewasa ini hampir semua Negara modern menganut pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi tiga kekuasaan (eksekutif, yudikatif dan legislative) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi adalah Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dalam sejarahnya demokrasi yang diterapkan di Indonesia diantaranya:

### **a. Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan**

Pada tahun 1945-1959, merupakan masa demokrasi konstitusional, dimana demokrasi dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang ada, dengan menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai.

Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.

Implementasi demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.<sup>40</sup>

b. Demokrasi Parlementer

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya.

Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.<sup>41</sup>

Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya.

Kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut.

---

<sup>40</sup>Ibid, hal 11.

<sup>41</sup>Ibid, hal 13.

Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem banyak partai (*multy party system*).

Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.

Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik, karena tidak dikenal adanya lembaga yang menghambat kebebasan tersebut. Pers memainkan peranan yang sangat besar dalam meningkatkan dinamika kehidupan politik, terutama sebagai alat kontrol sosial. Sekalipun per situ sendiri merupakan instrument politik yang sangat efektif dari sejumlah partai politik.

c. Demokrasi Terpimpin

Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingan

ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.<sup>42</sup>

Dekrit Presiden tersebut memberikan peluang yang sangat besar bagi Presiden Soekarno untuk mewujudkan gagasan politiknya dan membuka kesempatan yang sangat besar bagi dirinya untuk memainkan peranan politik yang selama ini tidak dapat dilakukan karena posisinya sebagai kepala negara.

Politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tarik ulur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, partai komunis Indonesia, angkatan darat.

d. Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru atau Demokrasi Pancasila

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1965 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru.

Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 berarti menegakkan kembali azas-azas Negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perseorangan dijamin dan Demokrasi Pancasila adalah demokrasi

---

<sup>42</sup>ibid, hal 25.

berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat.

Prinsip-prinsip demokrasi pancasila:

1. Pengaturan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
3. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Aspek-aspek dalam demokrasi pancasila:

1. Aspek formal, yakni aspek yang mempersoalkan proses dan cara rakyat dalam menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan serta cara mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur untuk mencapai konsesus bersama.
2. Aspek materiil, yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabatnya dan menjamin terwujudnya manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat manusia.

3. Aspek normative, yaitu aspek yang mengungkap kaidah-kaidah yang mengatur langkah untuk mencapai tujuan negara.

### **C. Penolakan Hizbut Tahrir terhadap sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia**

Bentuk penolakan Hizbut Tahrir terhadap sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia diantaranya press release, kritikan kepada pemerintah melalui edaran pamflet dan lain-lain. Dari berbagai bentuk tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan beberapa cara, diantaranya orasi, demo, kampanye politik, seminar, dan lain-lain. Beberapa bentuk penolakan tersebut dibuktikan dengan aksi-aksi, diantaranya:

#### **1. Kampanye Politik**

Dalam melancarkan penolakan demokrasi, Hizbut Tahrir menjalankan aksi-aksi diantaranya telah terjadi kampanye politik yang terjadi di Banjarmasin, aksi mereka didukung dengan memberikan selebaran kepada pengguna jalan Hasan Basri, Banjarmasin, sambil membentangkan beberapa spanduk bertuliskan “Tinggalkan Demokrasi, Tegakkan Khilafah”.<sup>43</sup> Selain itu di kota Bojonegoro Hizbut Tahrir juga melakukan Kampanye Politik Islam. Dimana kampanye ini bertema “Untuk Indonesia Lebih Baik:

---

<sup>43</sup>*Tegakkan Khilafah, Tinggalkan Demokrasi*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/16/tegakkan-khilafah-tinggalkan-demokrasi/>, diakses 16 maret 2014.

Tinggalkan Demokrasi, Tegakkan Khilafah”. Aksi ini ikut mewarnai pusat kota Bojonegoro.<sup>44</sup>

Selain itu, Hizbut Tahrir Indonesia pusat juga mengadakan orasi ini yang diselenggarakan di Tangerang, dengan mengusung tema “Selamatkan Indonesia dengan Syariah dan Khilafah, Campakkan Demokrasi”.<sup>45</sup>

Khilafah menurut mereka adalah model kepemimpinan terbaik yang akan menyatukan agama dan kekuasaan, sehingga kemuliaan politik Islam mampu menyentuh seluruh lapisan umat, bukan hanya kaum muslimin, namun juga non muslimin. Diharapkan aksi ini mampu memahamkan masyarakat akan rusaknya demokrasi dan mendorong masyarakat untuk bersama menegakkan syariah dan Khilafah.

## 2. Aksi on the spot

Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan aksi on the spot diberbagai kota besar, diantaranya bertempat di kabupaten Tuban, dimana dalam aksi on

---

<sup>44</sup> Untuk Indonesia lebih baik remaja dan mahasiswa bojonegoro serukan tinggalkan demokrasi tegakkan khilafah, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/30/untuk-indonesia-lebih-baik-remaja-dan-mahasiswa-bojonegoro-serukan-tinggalkan-demokrasi-tegakkan-khilafah/>, di akses pada 27 April 2014.

<sup>45</sup> Akhir tahun, HTI sepatan serukan tolak demokrasi di pusat keramaian, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/01/02/akhir-tahun-hti-sepatan-serukan-tolak-demokrasi-di-pusat-keramaian/>, di akses pada 12 Mei 2014.

the spot ini, Hizbut Tahrir mengangkat tema “Demokrasi Terbukti Mahal, Tidak Menyejahterakan”.<sup>46</sup>

Selain itu, Hizbut Tahrir juga mengadakan aksi yang sama namun berbeda kota, aksi kali ini bertempat di kota Sukabumi, yang pada kesempatan kali ini mengambil tema Khilafah vs Demokrasi, dalam aksi ini peserta disuguhkan berbagai fakta bahwa “demokrasi itu bobrok”.

Aksi ini juga terjadi di Makassar, Padang dan Manado, dimana intelektual muslimah dan aktivis mahasiswi dari berbagai kampus di kota masing-masing berkumpul untuk menyerukan “Tinggalkan Demokrasi, Tegakkan Khilafah untuk Indonesia Lebih Baik”.

Acara kemudian di akhiri dengan doa bersama yang di antara doanya melontarkan harapan agar umat segera mampu menegakkan Syariah dan Khilafah di muka bumi.

### 3. Diskusi

Di NTB, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan diskusi dengan beberapa intelektual dari kampus-kampus yang berada di

---

<sup>46</sup> Aksi On The Spot HTI DPD II Kabupaten Tuban: Indonesia Milik Allah!. <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/19/aksi-on-the-spot-hti-dpd-ii-kabupaten-tuban-indonesia-milik-allah/>, di akses 20 Maret 2014.

NTB. Dalam diskusi ini, menghasilkan persetujuan yang bertajuk “Tinggalkan Demokrasi Tegakkan Khilafah untuk Indonesia Lebih Baik”.<sup>47</sup>

Selain itu, aktivis Hizbut Tahrir Yogyakarta mengadakan diskusi Intelektual Muslimah DIY, dengan tema “Indonesia Akan Lebih Baik dengan Khilafah”. Dalam diskusi ini, memaparkan bahwa klaim-klaim demokrasi yang menjanjikan kesejahteraan hanyalah sekedar janji.<sup>48</sup>

Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia di Denpasar, mengadakan diskusi dengan tema “Perubahan Indonesia Lebih Baik dengan Khilafah”. Peserta yang hadir dari delegasi lembaga dakwah kampus, lembaga ekstra kampus dan mahasiswi muslimah dari berbagai kampus di Bali.<sup>49</sup>

Khilafah merupakan tawaran untuk perbaikan Indonesia. Dengan prinsip yang sedemikian rupa, khilafah dapat melahirkan sistem ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok individu dan kebutuhan asasi masyarakat. Khilafah juga mempunyai sistem hukum dan sanksi yang pasti membuat jera pelaku serta mencegah masyarakat lainnya untuk melakukan hal serupa, sekaligus juga sebagai penebus dosa. Sistem sosial yang diterapkan

---

<sup>47</sup> *Peran intelektual wujudkan Indonesia lebih baik tinggalkan demokrasi, tegakkan khilafah*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/peran-intelektual-wujudkan-indonesia-lebih-baik-tinggalkan-demokrasi-tegakkan-khilafah/>, di akses pada 27 April 2014.

<sup>48</sup> *Diskusi Intelektual Muslimah DIY: Indonesia akan lebih baik dengan khilafah*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/26/diskusi-intelektual-muslimah-diy-indonesia-akan-lebih-baik-dengan-khilafah/>, di akses pada 27 April 2014.

<sup>49</sup> *Mahasiswa muslimah Bali sepakat perubahan Indonesia lebih baik dengan khilafah*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/20/mahasiswi-muslimah-bali-sepakat-perubahan-indonesia-lebih-baik-dengan-khilafah/>, diakses pada 27 April 2014.

khilafah sangat menjamin keterlibatan laki-laki dan perempuan di sektor publik tanpa melalaikan peran utama mereka dan tanpa eksploitasi.

#### 4. Bedah Buku

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Padang Sumbar secara serentak melaksanakan rangkaian agenda Kajian Politik Muslimah. Dimana mengadakan acara Bedah buku yang bertema “Ilusi Negara Demokrasi”, dalam tema ini narasumber memaparkan perbedaan mendasar antara politik dalam Islam dengan politik kekuasaan dalam sistem Demokrasi.<sup>50</sup>

DPD Hizbut Tahrir Indonesia Kabupaten Majalengka menggelar Bedah Buku dengan tema “Demokrasi Sistem Kufur”. Dalam diskusi ini, dikupas tuntas seputar keharaman demokrasi baik mengambil, menerapkan atau menyebarkan, selain itu juga mengungkapkan fakta akibat buruk dari penerapan demokrasi.<sup>51</sup>

Yang harus dilakukan oleh umat tidak lain dengan melakukan perubahan. Hal tersebut dilakukan dengan tindakan politik dengan melakukan dakwah ke tengah-tengah masyarakat, menyadarkan umat tentang keburukan

---

<sup>50</sup> *Ilusi negara demokrasi dan peran politik intelektual mewujudkan Indonesia lebih baik*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/19/ilusi-negara-demokrasi-dan-peran-politik-intelektual-mewujudkan-indonesia-lebih-baik/>, di akses pada 27 April 2014.

<sup>51</sup> *Bedah buku “Demokrasi Sistem Kufur” DPD I HTI Majalengka*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/31/bedah-buku-%E2%80%9Cdemokrasi-sistem-kufur%E2%80%9D-dpd-i-hti-majalengka/>, di akses pada 27 April 2014.

ide demokrasi sekaligus menjelaskan penggantinya. Sistem penggantinya itu tiada lain adalah sistem Islam itu sendiri.

## 5. Press Release

Dalam Press Release Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Intelektual Muslimah Serukan Indonesia Lebih Baik dengan Meninggalkan Demokrasi dan Menegakkan Khilafah. Sebagai kontribusi aktif menyelesaikan persoalan bangsa, para intelektual muslimah se-Indonesia bersama Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyerukan: Wahai Intelektual Muslimah, “Saatnya Anda menguatkan komitmen untuk berjuang mewujudkan perubahan hakiki, Tinggalkan Demokrasi Tegakkan Khilafah Menuju Indonesia Lebih Baik. Allahu Akbar”.<sup>52</sup>

Bagi kaum intelektual, khilafah tidak hanya menjadi jalan lahirnya Indonesia yang lebih baik namun juga memberikan harapan kembali hadirnya peradaban Islam yang terbukti telah berhasil memimpin peradaban dunia dan mewariskan perkembangan tertinggi ilmu pengetahuan sepanjang 12 abad. Firman Allah swt:

*“Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-Nya itu lebih baik, atautkah orang-orang yang*

---

<sup>52</sup> Press release muslimah Hizbut Tahrir Indonesia intelektual muslimah serukan Indonesia lebih baik dengan meninggalkan demokrasi dan menegakkan khilafah, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/14/press-release-muslimah-hizbut-tahrir-indonesia-intelektual-muslimah-serukan-indonesia-lebih-baik-dengan-meninggalkan-demokrasi-dan-menegakkan-khilafah/>, di akses pada 27 April 2014.

*mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*“(At- Taubah [9]: 109).

## 6. Workshop

Muslimah Hizbut Tahrir menyelenggarakan worksop di Purbalingga. Dimana dalam workshop ini disajikan beberapa konsekuensi jika hidup tanpa khilafah. Di antara konsekuensi itu adalah kita bisa mati jahiliyah (mati dalam keadaan dosa besar), dikarenakan tidak ada ba'iat kepada Khalifah, karenanya mari berjuang menegakkan khilafah bersama Hizbut Tahrir jika tidak ingin mati jahiliyah. Dari acara tersebut terungkap bahwa, “Demokrasi sistem rusak dan kufur dan Khilafah Islamiyyah solusinya”.<sup>53</sup>

Selain itu, HTI Press DPD II Cirebon mengadakan Workshop dengan tema acara “Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah, Demokrasi Menghinakan Perempuan, Khilafah Memuliakan Perempuan”. Dalam workshop ini memaparkan definisi, sejarah lahirnya demokrasi.<sup>54</sup> Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (DPP HTI) juga menyelenggarakan Workshop Tokoh Nasional. Acara yang diselenggarakan di Hotel Sofyan Cut

---

<sup>53</sup> *Workshop HTI Purbalingga dan Banjarnegara demokrasi sistem rusak dan kufur khilafah penggantinya*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/01/workshop-hti-purbalingga-dan-banjarnegara-demokrasi-sistem-rusak-dan-kufur-khilafah-penggantinya/>, di akses pada 27 April 2014.

<sup>54</sup> *Worksop muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) II Cirebon*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/05/20/workshop-muslimah-hizbut-tahrir-indonesia-mhti-dpd-ii-cirebon/>, di akses pada 27 April 2014.

Mutia Jakarta tersebut bertajuk “Demokrasi Sistem Rusak, Khilafah Sistem Terbaik”. Dalam workshop ini memaparkan tentang hakikat demokrasi.<sup>55</sup>

Dalam Islam, terdapat solusi yang bisa memecahkan permasalahan yang menimpa umat khususnya generasi dan perempuan. Yaitu kembali pada sistem dan aturan hidup yang dibawa oleh Rasulullah Saw dengan penerapan syariah Islam dalam Institusi Negara Khilafah. Sistem Khilafah memiliki mekanisme untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena Islam memiliki hukum yang sempurna. Hukum Islam diterapkan oleh individu dan Negara.

## 7. Kajian Islam

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan kajian Islam di kota Surabaya. Acara ini bertema ”Syariah dan Khilafah Menjamin Kesejahteraan Rakyat” tersebut, menghadirkan dua orang pembicara yaitu Ustadzah Nizzah Alya dan Ustadzah Nurul Husna. Keduanya adalah anggota Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia. Sehingga dalam acara ini dapat diserukan ”Tolak Demokrasi, Dukung Khilafah”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Workshop tokoh nasional: Tokoh Nasional, Mantan menteri, Pemimpin Ormas berdiskusi serius tentang demokrasi dan khilafah*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/12/24/workshop-tokoh-nasional-tokoh-nasional-mantan-menteri-pemimpin-ormas-berdiskusi-serius-tentang-demokrasi-dan-khilafah/>, di akses pada 27 April 2014.

<sup>56</sup> *Tolak demokrasi dukung khilafah*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/07/tolak-demokrasi-dukung-khilafah/>, di akses pada 27 April 2014.

Demokrasi merupakan sistem kufur yang merusak dan terbukti telah membawa keterpurukan bagi Indonesia. Sistem terbaik bagi perubahan Indonesia adalah Khilafah. Bahwa pemilu dalam demokrasi tidak akan menghantarkan Indonesia menuju perubahan yang lebih baik, hanya perubahan Islam yang bisa membawa kebaikan Indonesia di bawah naungan Khilafah.

Dari beberapa bukti-bukti penolakan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia dapat dilihat jelas bahwa bukti-bukti tersebut mampu memahamkan masyarakat akan rusaknya demokrasi dan mendorong masyarakat untuk bersama menegakkan syariah dan Khilafah. Khilafah, menurut mereka, adalah model kepemimpinan terbaik yang akan menyatukan agama dan kekuasaan, sehingga kemuliaan politik Islam mampu menyentuh seluruh lapisan umat, bukan hanya kaum muslimin, namun juga non muslimin.

Khilafah merupakan tawaran untuk perbaikan Indonesia. Dengan prinsip yang sedemikian rupa, khilafah dapat melahirkan sistem ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok individu dan kebutuhan asasi masyarakat. Khilafah juga mempunyai sistem hukum dan sanksi yang pasti membuat jera pelaku serta mencegah masyarakat lainnya untuk melakukan hal serupa, sekaligus juga sebagai penebus dosa. Sistem sosial yang diterapkan khilafah sangat menjamin keterlibatan laki-laki dan perempuan di sektor publik tanpa melalaikan peran utama mereka dan tanpa eksploitasi. Dari sini,

dapat terlihat bahwa semua kerusakan yang kita temui saat ini terselesaikan hingga ke akarnya.

Adanya penolakan tersebut tentu saja disebabkan dari beberapa hal yang mendorong Hizbut Tahrir Indonesia untuk melakukannya. Hal tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya.